

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Era sekarang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) semakin meningkat dalam penyusunannya. LKPD merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban yang disusun secara terstruktur yang berisi mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Seiring perkembangannya paradigma pembangunan nasional juga mengalami perubahan yang sangat berdampak positif. Adapun perubahan ini diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (revisi UU No. 32 Tahun 2004).

Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang sekarang diubah menjadi PP No. 71 Tahun 2010 (Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual) berlaku mulai tahun anggaran 2015. Penelitian yang dilakukan oleh Mahardini dan Miranti (2018) menunjukkan bahwa standar akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah secara signifikan. Triwardana (2017) juga membuktikan bahwa standar akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sementara dalam penelitian Rahmah dan Zulkifli (2018) juga membuktikan bahwa standar akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Untuk memperoleh hasil laporan yang berkualitas maka pemerintah daerah harus menetapkan SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebuah bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah terutama dalam hal pelaksanaan perekonomian negara. Pemerintah daerah yang memiliki wewenang dana publik yang harus bisa menyediakan informasi keuangan yang memenuhi syarat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian serta pengambilan keputusan harus sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas berupa informasi keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah hendaknya sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* (Defitri, 2018). Dalam pencapaiannya untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya prinsip dan peraturan yang harus dipenuhi namun diperlukan orang yang berkompeten.

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan

fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Triwardana, 2017). Kegagalan seorang akuntan dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian standar laporan yang ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Mahardini dan Miranti (2018) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah secara signifikan. Sementara penelitian Setyowati (2016) juga membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Tidak hanya orangnya dalam proses penyusunan laporan keuangan perlu adanya sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai.

Menurut Nordiawan (2008) dalam Rahmah dan Zulkifli (2018) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Untuk itu sangat diperlukan adanya sistem akuntansi keuangan daerah untuk membantu memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi dan keabsahan pembelanjaan dana. Penelitian yang dilakukan Defitri (2018) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah secara signifikan. Dalam penelitian Mokoginta, dkk (2017) juga sama membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan dalam penelitian Rahmah dan Zulkifli (2018) membuktikan bahwa sistem keuangan daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Dalam prosesnya sangat diperlukan adanya pengendalian internal untuk pengawasan keandalan laporan yang disusun akuntan. Berdasarkan COSO (2013) dalam Chodijah dan Hidayah (2018) menyatakan bahwa pengendalian internal adalah proses, karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dan kegiatan manajemen dasar. COSO juga mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, manajemen, dan mereka yang berada di bawahnya untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian internal dicapai dengan hal berikut: efektifitas dan efisiensi operasional organisasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Chodijah dan Hidayah (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah secara signifikan. Putri, dkk (2017) membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penerapan standar dan sistem yang baik serta pengawasan yang optimal dari pihak internal maupun eksternal terhadap kualitas laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal



Kualitas laporan keuangan daerah setiap tahun anggarannya akan mendapatkan pemeriksaan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) berupa opini. Mahardini dan Miranti (2018) menyatakan bahwa opini merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran atas laporan keuangan, dimana opini BPK ini didasarkan pada Standar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007. Terdapat empat opini yang dapat diberikan oleh seorang auditor yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Dalam penyusunan laporan keuangan standar akuntansi pemerintah merupakan syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan pemerintah dapat ditingkatkan. Dengan adanya pemahaman tentang SAP berbasis akrual diharapkan dapat meningkatkan susunan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan).

Pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan, kenyataannya masih terdapat pegawai di pemerintahan tidak memahami sistem akuntansi dan standar yang berlaku. Namun hal ini tidak terjadi di Kabupaten Kudus.

Fenomena dan kenyataan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2018 yang di lansir dari berita Tirbun Jateng menyatakan bahwa pemerintah kabupaten Kudus mendapatkan opini dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian ini merupakan kali keenam

berturut-turut bagi kabupaten kudas. Kepala BPK Perwakilan Jateng Hery Subawa menyebutkan bahwa opini ini diberikan atas akuntabilitas laporan keuangan yang dilakukan setiap tahun. Dan telah dilakukan sistem pengawasan dan keseimbangan dari laporan yang ada dengan lima indikator asersi laporan keuangan. “Pertama yaitu keterjadian dan keberadaan. Kita buktikan dengan transaksi yang ada hingga wujud fisiknya,” kata Hery dalam keterangan tertulisnya. Selain itu, ada penilaian, hak, kewajiban, kelengkapan, dan pengungkapan. Namun Hery lebih menekankan pada pengawasan internal, sehingga pengelolaan keuangan akan semakin baik, bukan hanya menunggu BPK.

Pemerintah Kabupaten Kudus tidak hanya puas dengan itu tapi akan tetap meningkatkan kualitas laporan keuangannya dengan SAP berbasis akrual. Dan semua kendala dalam proses penyusunannya akan dijadikan sebagai sebuah poin penting untuk yang lebih baik.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Rahmah dan Zulkifli (2018). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama dalam penelitian terdahulu hanya menggunakan dua variabel independen yaitu standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan sistem akuntansi keuangan daerah, sedangkan penelitian ini menambah dua variabel independen yaitu sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia karena dua variabel ini juga mempengaruhi seberapa berkualitas suatu laporan keuangan, dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten dan di kontrol secara baik ini akan menabahnya kualitas laporan keuangan pemerintah semakin baik.

Kedua dalam penelitian ini terdapat perbedaan objek penelitian, pada penelitian sebelumnya lokasinya yaitu Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul DIY, sedangkan penelitian ini memiliki lokasi di Pemerintah Kabupaten Kudus Jawa Tengah.

Berdasarkan informasi yang dipaparkan diatas maka judul penelitian ini yaitu **“PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH”**

## **1.2 Ruang Lingkup**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih terarah dan menghindari hasil penafsiran penelitian yang tidak diinginkan atas hasil penelitian, maka penelitian ini lebih difokuskan pada pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang terjadi adalah raihan WTP yang didapatkan oleh kabupaten kudus ke enam kalinya secara berturut-turut yang membuat peneliti ingin mengetahui pengaruh dari penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumberdaya terhadap kualitas laporan

keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
2. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
3. Apakah penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
4. Apakah penerapan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

#### **1.4 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian yang telah di kemukakan di atas, maka didapatkan tujuan dari penelitian adalah untuk:

1. Menguji pengaruh standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Menguji sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3. Menguji sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
4. Menguji kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.



## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan secara teoritis**

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai faktor faktor motivasi yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi.

### **1.5.2 Kegunaan secara praktis**

#### **a. Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas informasi akuntansi pada instansi pemerintah. Terutama kaitanya dalam standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal, dan sumber daya manusia.

#### **b. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain untuk dikaji lebih dalam mengenai permasalahan dan kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini dapat terus bermanfaat dalam pengembangan ilmu akademik.

#### **c. Bagi Organisasi Perangkat Daerah**

Hasil ini diharapkan dapat dijadikan acuan terkait kinerja pemerintah daerah. pemerintah daerah juga dapat mengetahui tingkat pemahaman standar akuntansi berbasis akrual yang dimiliki oleh pegawai pemerintah daerah dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas, yang nantinya akan

menjadi sarana informasi bagi pihak eksternal. Selain itu, sebagai dasar evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang.

d. Bagi Masyarakat

Hasil ini diharapkan dapat membawa wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus.

